



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon (0543) 21013
TANA PASER

NOTULEN

RAPAT KONSULTASI KOMISI III DPRD KABUPATEN PASER DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBAHASAN RAPERDA APBD KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2022.

A. DASAR

1. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Paser Nomor : 28 Tahun 2021, tanggal 1 November 2021.
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomer : 172.14/339 /DPRD tanggal 15 November 2021.

B. TUJUAN

Rapat Konsultasi Komisi III dilaksanakan untuk mendapatkan informasi terkait Raperda APBD Kab.Paser Tahun Anggaran 2022

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari	:	Senin dan Selasa
Tanggal	:	22 November 2021
Jam	:	10.00 Wita sampai dengan selesai
Tempat	:	Ruang Bapekat DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Basri Mansur, S.AP, selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Paser .

E. PESERTA RAPAT

1. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Paser
2. Plt. Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Ka.Paser
3. Plt. Bappeda Litbang Kab.Paser
4. BKAD Setda Kab.Paser
5. Dinas Kominfo Kab.Paser
6. Dinas Lingkungan Hidup Kab.Paser.
7. Dinas PUTR Kab.Paser
8. Dinas Perkim Kab.Paser
9. Dinas Perhubungan Kab.Paser

F. PEMBAHASAN

- **Basri Mansur, S.AP selaku Wakil Ketua Komisi** mengatakan bahwa terkait hasil penginputan KUA dan PPAS dan Nota rancangan Peraturan Daerah Tahun 2022 serta kompilasi yang disampaikan pada Banggar dan TAPD. Untuk DLH dan Dinas Kominfo Kab.Paser belum memberikan data. Mohon penjelasan terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2022.
- **Ina Rosana selaku Kadis Kominfo Kab.Paser** mengatakan bahwa anggaran di tahun 2022 sebesar 32 milyar lebih ada peningkatan grafiknya dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 56,27%.. Adapun dalam arahan Bupati Paser ada 3 (tiga) tugas besar yang harus diselesaikan : menuntaskan program smart city, mengatasi bank spot, mewujudkan/merealisasikan Coment Centre. Ada 7 (tujuh) kegiatan yang prioritas di tahun 2022. Program komunikasi Publik kerjasama dengan media. Kerjasama dengan media dengan anggaran 557 juta sisa 37 juta pelatihan di Desa Senaken. Program aplikasi informatika ada beberapa kegiatan yang dilakukan di 311 titik . 7 (tujuh) milyar untuk pembangunan coment centre/pusat komando di samping ruang Bupati guna memberikan informasi pada pengangkat- Tahap perencanaan sampai evaluasi monitoring dapat di akses di koment centre. Program E- Government kegiatannya mendukung saja. Teknologi informasi dan sinkronisasi satu web site. Program penyelenggara statistic sectoral adalah big data semoga terwujud di tahun 2022. Penyelenggaraan sistem komunikasi 9 Milyar. Untuk tahun 2022 akan dibangun 5 (lima) menara antara lain : Desa belimbing, Desa Muara Toyu, Longkali, Desa Tanjung Harapan dan Desa Batu Engau. Masih ada 15 (lima belas) Desa yang blank spot yang artinya masih terkendala jaringan baik itu yang sama sekali tidak ada jaringan. Yang sudah dibangun menara adalah Desa Busui, Segendang dan Sweto. Menara yang dibangun rata-rata 72 meter.
- **Rahmad** mengatakan bahwa untuk Desa Tanjung Pinang jaringan 4G sudah ada di bangun tahun 2014 dan jaringan sudah tercover. Rencananya jaringan 4G akan masuk ke Desa Segendang dan ada 3 (tiga) Desa yang bisa terkondisi.
- **Hj. Ina Rosana selaku Kadis Kominfo Kab.Paser** mengatakan bahwa dengan anggran 32 milyar akan dibangun menara di Daerah Belimbing, Muara Payang, Tanjung Harapan, Longkali, Muara andeh akan di survey dimana titik yang pas posisinya kemudian menentukan tempat bedirinya menara tersebut.
- **Dinas Kominfo Kab.Paser** mengatakan bahwa dengan anggaran Bankue tahun 2016 di Desa Tanjung Pinang telah dibangun Menara. Di Desa Segendang ada 3 (tiga) Desa yang dapat terkoneksi yaitu Desa Random dank laden satu menara tinggal mencari titik yang pas untuk penempatan menara tersebut dan penduduk sudah melebihi 1.000 .
- **Khozinatul Asror selaku Kabid TIK Dinas Kominfo** mengatakan bahwa terkait PAD potensi yang ada sudah mengupayakan dari retribusi menara sebesar 230 juta. Jaringan di beberapa desa sudah diselsaikan diantaranya Desa Lomu, Riwang, Muara lambakan.
- **DLH Kab.Paser** mengatakan bahwa anggaran DAK DR lebih banyak digunakan pada Bidang Tahura (dana reboisasi) dan sebagian di gunakan oleh BPMPD dan Damkar. Dari Kementerian LHK mewajibkan setiap Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan kualitas lingkungan air, tanah, dan udara secara periodic dua kali tahap pemantau setiap tahun. Hasil pemantauan itu menjadi acuan perhitungan indeks kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Untuk tahun 2022 anggaran APBD hanya dapat mengcover pembiayaan pemantauan lingkungan untuk satu kali tahap pemantauan dari target dua kali pemantauan dalam satu tahun. Tahun 2022 dana 400 juta untuk satu periode dalam kegiatan pengawasan pelaku usaha. Pemantauan/ pengawasan kualitas air sungai dilakukan dua periode. Pemantauan pada hulu dan hilir sungai. Ada 10 (sepuluh)

- **DAS di Kabupaten Paser.** Ada 4 (empat) DAS utama Target indeks lingkungan pengampilan sample/ pemantauan sebagai pelaku usaha. Di Kabupaten Paser terdapat Laboratorium lingkungan yang terletak di Desa Tanah Priuk belum dapat beroperasi dikarenakan peralatan laboratorium yang belum tersedia. Saat ini DLH hanya memiliki dua petugas pengambil sample air bersertifikat kompetensi dan memiliki dua pejabat fungsional pengawas perlu lingkungan hidup dan tiga pejabat fungsional pengendali dampak lingkungan hidup. Pengelolaan Tahura kegiatan operasional memakai dana DBH dan tetap mengikuti aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup sampai tahun 2022 tersisa 35 milyar. Saprass untuk pencegahan hutan dan lahan di gunakan oleh Damkar, BPMPD. Kendala di bidang Tahura ada sebagian membuat pembuatan brigad gaji diambil dari dana DBH. Kegiatan Tahura serapannya tidak 100% (seratus persen) habis karena kondisi dilapangan sehingga anggaran tidak terserap. Kegiatan kebakaran dapat dioptimalkan. Berharap kegiatan di tahura tahun depan menjadi PAD dan berharap dapat bekerjasama dengan swasta. Penangkaran rusa berada di dalam wilayah Tahura.
- **Ir. Tri Evi Herawati H, ST selaku Kabid Bina Marga** mengatakan bahwa Kegiatan tahun 2022 terkait pinjaman Daerah sudah pada tahap perencanaan akhir bulan November sudah selesai. Selanjutnya akan berkoordinasi dengan LKPP terkait pelelangan mendahului Nomenklatur ada dirubah untuk kegiatan di longkali, Rantau Blimbing dan Sebakung di rubah menjadi kegiatan Mendik Makmur, Mendik Bakti dan Mendik Karya. Tahun 2022 kegiatan di Pekuin Lambakan akan dirubah. Kesalahan Nomenklatur jembatan titian akan dirubah karena di pros jalan tidak ada jembatan.
- **H. Fatur Rahman, ST selaku anggota Komisi III Kab.Paser** mengatakan bahwa terkait pinjaman paket kegiatan yang sudah di rubah agar segera dilaporkan. Proses dari nol sampai selesai bulan pengerjaan yaitu berupa fisik dari 0 sampai 100% finishing anggran. Ada 5 (lima) segmen dala satu link (kerang) secara logika kondisi jalan masih hancur sementara material lewat di situ dan tidak mudah mengerjakannya dalam kurun satu tahun. Adakah opsi lain /sistem pengerjaanya dalam waktu satu tahun mohon penjelasannya ?
- **Desiana Agustina Kasi Perencanaan dan Pengawasan Bina Marga Kab.Paser** mengatakan bahwa Kegiatan di Kerang ada lima segmen sementara ini metode pelaksanaan Pagu 30 milyar memang pada metode pelaksanaan Bacing plant di letakkan pada lokasi kegiatan tersebut dan material disiapkan dalam satu atau dua bulan dan pada saat pengecoran masing –masing segmen dikerjakan.
- **Budi Santoso,ST, M.Si selaku anggota DPRD Kab.Paser** mengatakan bahwa secara teknis tetap sesuai dengan hasil rapat koordinasi terdahulu. Hasil akhir tidak keseluruhan beton. Pada prinsipnya kegiatan ini dikaji dengan anggaran 600 milyar dengan panjang 2.000 (dua ribu) kilo dengan menggunakan agregat. Pada Prinsipnya mendukung Visi-Misi Bupati Paser.
- **Ir. Tri Evi Herawati H, ST selaku Kabid Bina Marga** mengatakan bahwa perencanaan pada tahap asistensi, diawal Desember sudah selesaiserta produknya dan akan di diskusikan lagi perzona untuk bahan –bahan materialnya. Produk rigit untuk segmen Tanjung Aru anggaran 120 milyar dengan lima segmen. Ada revisi untuk ruas Tanjung Aru 120 milyar dan ada beberapa ruas segmen yang di pisah.
- **Budi Santoso,ST, M.Si selaku anggota DPRD Kab.Paser** menyarakan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dalam pengawasan sebaiknya menggunakan dron.
- **H. Fatur Rahman, ST selaku anggota Komisi III Kab.Paser** mengatakan bahwa menggunakan dron atau CCTV dapat digunakan untuk complaint pada kontraktor yang menyalahi aturan pekerjaan.

- **Asnawi selaku Kabid LK Cipta Karya Kab.Paser** mengatakan bahwa untuk kegiatan tahun 2021 sampai saat ini proses lelang sudah tayang semua baik kegiatan di Murni dan Perubahan Untuk Kegiatan Pemilihan langsung perencanaan sudah selesai dan kegiatan fisik sudah selesai. Progres cukup baik. Dan pada bulan Desember akan konsen ke lapangan. Ada dua program yang populer I tahun 2022 yaitu bangunan gedung dan air bersih. Program air bersih ada lima program dari Pekim dan DLH. Program penataan gedung, air bersih seperti jaringan listrik. Kegiatan Drainase anggrannya cukup besar di tahun 2022. Limbah domestik berkaitan dengan limbah rumah tangga seperti tinja. Lanjutan Komplek perkantoran 10 milyar termasuk pengawasan 100 juta. Apakah full design di tahun 2022. Gedung Perkantoran pada Gedung 7 minta dilengkapi dengan sarana lif. Rehap atap + 900 juta pada gedung kejaksaan Negeri di rubah menjadi rehab kantor kejaksaan Negeri.
- **Asnawi selaku Kabid LK Cipta Karya Kab.Paser** mengatakan bahwa untuk kegiatan masjid di Desa Lempesu 500 juta ternyata kegiatan tersebut tidak ada. Kegiatan di tahun 2021 sebesar 700 juta ditunda untuk pembangunan pagar Pendopo dan pintu gerbang secara teknis tidak akan selesai.
- **Basri Mansur, S.AP selaku wakil ketua Komisi III DPRD Kab.Paser** mengatakan bahwa apakah kegiatan baru atau lanjutan untuk pekerjaan perkantoran 9 lebih milyar multi years. Pekerjaan Drainase dalam kota 4 milyar lokasi dimana saja ?
- **Asnawi selaku Kabid LK Cipta Karya Kab.Paser** mengatakan bahwa kegiatan perkantoran sudah selesai jika dilihat itu pekerjaan lanjutan. Drainase dalam kota titik genangan air dalam kota dan master plant dalam kota jika memungkinkan akan menggeser trotoar antara pagar dan tanaman segmen dari Singa Maulana.
- **Ali Nor Muhamad selaku Kabid anggaran BKAD Kab.Paser** mengatakan bahwa kegiatan yang sudah di paripurnakan tidak boleh dihilangkan. Tanggung Jawab kegiatan adalah pada OPD masing-masing.
- **Hj. Dian Yuniarti, S.Sos selaku Sekretaris Komisi III Kab.Paser** mengatakan bahwa pernah mengusulkan rehab jembatan sungai Klato yang hanya menggunakan kayu ulin hilang kegiatannya. Dan dimasukkan lagi dengan anggaran 1,5 milyar rangka baja sampai saat ini belum terealisasi. Terkait drainase tidak hanya di Kota saja tetapi meliputi pedesaan dan memang sangat diperlukan.
- **Asnawi selaku Kabid LK Cipta Karya Kab.Paser** mengatakan bahwa terkait kegiatan multi years tidak ada hutang untuk gedung perkantoran 5 dan 6. Anggaran 9 milyar untuk perkantoran untuk tindak lanjut belum tahu. Usulan baru untuk gedung 7 multi years hampir 10 milyar.
- **Salman selaku Kabid SDA Kab.Paser** mengatakan bahwa dari 23 kegiatan merevisi nomenklatur sumberdaya air pengelolaan menjadi penetapan
- **Basri selaku Wakil Ketua Komisi III Kab.Paser** mengatakan bahwa ingin mengetahui apa saja permasalahannya di Dinas Perkim ini, Apakah ada nomenklatur yang tidak sesuai dengan spesifikasi di SIPD agar kiranya disampaikan saja. Terkait program kerja Disperkim apakah sesuai dengan rpjmd dan renstra tahun 2022. Mohon agar dapat menyampaikan apa saja terkait raperda APBD tahun 2022 karena tanggal 29 november nanti kita sudah pengesahan.
- **Syahdani selaku Sekretaris Disperkim Kab.Paser** mengatakan bahwa di tahun 2022 masih mengurus 2 (dua) urusan yaitu urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan kedua urusan pemerintahan bidang pertanian. Jadi dari sisi penganggaran tahun 2022 yang sudah kita dapatkan pagu dananya untuk urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman ini memperoleh dana 1 51,94 Milyar lebih sedangkan untuk

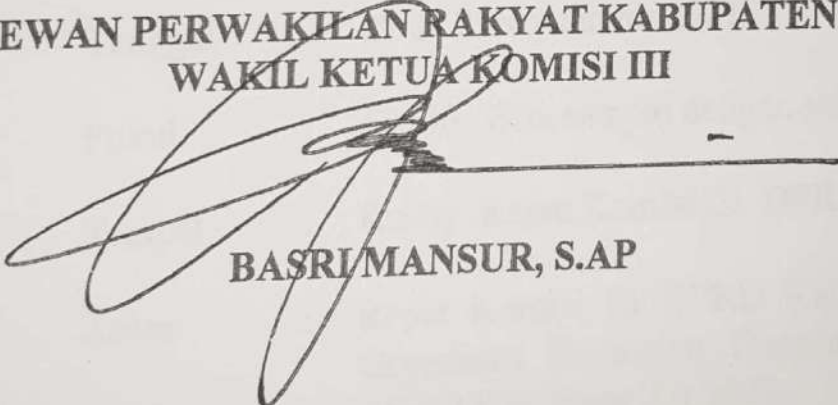
bidang pemerintahan dan pertanahan kita mendapat pagu dana 8,3 Milyar. Dari beberapa urusan yang ada dibidang perumahan dan kawasan permukiman yang ada program yang cukup banyak memperoleh dana yaitu program rehap dan pembangunan rumah korban bencana dengan realokasi sekitar 200 unit dengan harga satu unitnya sekitar 25 juta dan yang besar juga di program peningkatan prasarana dan utilitas umum memperoleh dana 125 Milyar, diantaranya kegiatan untuk peningkatan jalan desa, jalan lingkungan, jalan gang. Data data ini sudah kita input di SIPD dan ini sudah di Bappeda semua dan sudah di kontrol oleh

BKAD, yang jadi kendala kita pada saat data dari Bappeda sudah masuk ini banyak yang masih belum jelas produk atau speknya jadi kita coba terjemahkan saja, jadi kita sesuaikan dengan yang ada di SIPD dan sesuai dengan SSH nya tapi ada kegiatan masih kita terjemahkan sendiri. Jadi total pagu kami dengan 2 kegiatan bidang ini sebesar 160,3 Milyar.

- **Basri Selaku Wakil Ketua Komisi III Kab.Paser** mengatakan bahwa jadi ini memang permasalahan bersama, ketika kita menginput di SIPD kita harus tahu dulu produknya apa, contoh di pokir dari Bappeda seharusnya sudah berkoordinasi dengan kita karenakan ada LO kita tau penghubung antara DPRD dan Bappeda dan ini tidak ada sama sekali informasi sehingga ada miskomunikasi. Saya rasa BKAD bisa berkoordinasi dengan bappeda secepatnya.
- **H. Fatur Rahman, ST selaku anggota Komisi III** selaku anggota komisi III mengatakan bahwa saya berharap dengan banyaknya anggaran yang diberikan agar dapat bermanfaat yang besar buat masyarakat, jujur saja masih banyak keluhan masyarakat terutama tentang kwualitas pengerjaan semenisasi misalnya yang belum 2 minggu selesai sudah banyak yang hancur atau berlobang sehingga ada yang menjadi temuan BPK. Saya berharap kedepan agar dapat dibenahi pengerjaannya misalkan pengerjaan semenisasi tidak diaduk dengan tangan manusia tapi menggunakan mesin molen sehingga terjaga kualitasnya.
- **Syahdani selaku Sekretaris Disperkim Kab.Paser** mengatakan bahwa terkait kwualitas memang tahun 2019 – 2020 ada dapat temuan dari BPK sekitar 2 Milyar, dan memang kita sudah mengingatkan pada tahun 2021 ini agar kontraktor mengikuti standar pekerjaan yang terbaru.
- **Budi Santoso, ST, M.Si selaku anggota komisi III** mengatakan bahwa banyak usulan dari kawan - kawan berada di Disperkim, dan saya berpesan kepada Disperkim jika ada kontraktor yang masih menggunakan pola lama tegur saja, pada prinsipnya kwualitas mutu harus dikedepankan.
- **Dian Yuniarti selaku Sekretaris Komisi III** mengatakan bahwa kepada Disperkim ingin menanyakan satu aspirasi yang telah terlaksana diperubahan tetapi saya lihat ini ada masuk kembali, disatu sisi yang telah masuk diperubahan ini semenisasi jalan lanjutan gang berdikari, sedangkan permohonan masyarakat itu tidak ada menyampaikan itu yang ada penyambungan jembatan. Ada Bahasa tidak bisa lanjut semenisasi lalu jembatan. Apakah dapat dirubah semenisasi lanjutan jalan gang berdikari ini dengan penyambungan jembatan. Mohon sedikit pejelasan nya ?
- **Syahdani selaku Sekretaris Disperkim Kab.Paser** mengatakan bahwa bisa dirubah pada saat ini sebelum di paripurnakan.
- **Basri Mansur, S.AP Selaku Wakil Ketua Komisi III** mengatakan bahwa terkait pembayaran lahan SMK 3 sudah sampai dimana dan apa tanggapan dari pihak UGM mohon penjelasannya ?
- **Cholik kabid Pertanahan Disperkim** mengatakan bahwa untuk pembayaran SMK 3 di perubahan ini sudah dianggarkan

- **Basri Masur, S.AP Selaku Wakil Ketua Komisi III** mengatakan bahwa kepada Dishub terkait masalah nomenklatur dan spesifikasi kegiatan dan permasalahan di dishub itu sendiri seperti apa sehingga akan kami jadikan kompilasi untuk disampaikan kepada TAPD mengingat anggaran 2022 akan segera disahkan di tanggal 29 nanti.
- **Inayattullah selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab.Paser** mengatakan bahwa di Dishub bukan saja ada belanja tetapi ada juga pendapatan yang dilaksanakan oleh unit - unit pelaksana teknis daerah yang ada di Dishub seperti retribusi kendaraan bermotor kami targetkan 1 milyar, retribusi parkir tepi jalan kami targetkan 147 juta, retribusi pelayanan pelabuhan 100 juta dan retribusi terminal kami targetkan 100 juta, sehingga totalnya menjadi 1 milyar 347 juta. Terkait dengan belanja sesuai dengan hasil koordinasi dan verifikasi kami dengan bappeda maka kami mendapat pagu anggaran sebesar 20 milyar 582 juta lebih yang terbagi 4 program 17 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Dari sub kegiatan tersebut terbanyak kegiatan bersifat non fisik dan ada 4 buah kegiatan fisik. Alhamdulillah minggu kemarin kami telah mendapatkan sertifikat dan SK dari Dirjen Perhubungan Darat terkait Akreditasi B pengujian kendaraan bermotor dan berlaku selama 4 tahun kemudian kami juga berencana bekerja sama dengan Bankatimtara akan melaksanakan kegiatan eletronik KIR atau pembayaran non tunai yang akan di launching pada bulan desember nanti.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PASER
WAKIL KETUA KOMISI III**



BASRI MANSUR, S.AP